

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat beragam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperoleh penghasilan sebagai sumber utama pemenuh kebutuhan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, populasi penduduk terus meningkat disertai dengan kemajuan teknologi sehingga membuat banyak orang sulit mencari pekerjaan, bahkan beberapa diantaranya kehilangan pekerjaan karena digantikan dengan mesin yang dilengkapi sistem kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Jika permasalahan ini dibiarkan terus-menerus, maka pengangguran akan meningkat serta dapat memicu kriminalitas (Rusnani, 2015). Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa di antara mereka mencoba untuk berwirausaha, baik secara individu maupun berkelompok karena minimnya lapangan pekerjaan (Kemenko Perekonomian, 2014).

Dari sekian banyak bentuk usaha yang ada, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) melaporkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu ranah yang paling banyak diminati oleh pelaku usaha di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkop UKM pada tahun 2019, UMKM memiliki pangsa pasar sekitar 99,99% dari total keseluruhan pelaku

usaha yang ada di Indonesia (Kemenkop UKM, 2019). Selain itu, UMKM juga terbukti ampuh dalam mengurangi jumlah pengangguran dan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara (Kemenko Perekonomian, 2021). Di Indonesia sendiri, UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian. Berdasarkan data Kemenkop UKM, jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dari sebesar 59,26 juta unit usaha pada tahun 2015, diperkirakan pada tahun 2020 akan terus bertumbuh hingga 68,60 juta unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Selain itu, UMKM juga memiliki daya serap tenaga kerja sebanyak 116,97 juta pekerja atau sebanyak 97% dari total tenaga kerja sebanyak 120,598 juta orang, serta dapat menampung sampai 60,42% dari total investasi yang ada di Indonesia (Kemenkop UKM, 2020). Berdasarkan data tersebut, UMKM mampu menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pengangguran.

Di tengah situasi pandemi Covid-19, perekonomian nasional dan global menjadi tidak stabil. Terhitung sejak munculnya pandemi pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi menjadi negatif sehingga terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena penurunan konsumsi rumah tangga atau kurangnya daya beli masyarakat akibat adanya pembatasan sosial (*social distancing*) yang dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 (DPRD-DIY, 2021). Sebagai bagian dari penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, UMKM menjadi salah satu pelaku usaha yang merasakan dampak besar akibat munculnya pandemi Covid-19. Menurut Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), dari hasil survei yang dilakukan Kemenkop UKM dan

sejumlah lembaga yang ada di Indonesia sebanyak 47% UMKM memilih untuk menutup sementara usahanya karena terus mengalami kerugian akibat dari pandemi Covid-19, dan beberapa UMKM harus gulung tikar karena tidak mampu lagi mempertahankan usahanya (Cahyani, 2020). Alasan utama banyak UMKM yang gulung tikar karena terus mengalami penurunan pendapatan sehingga para pelaku UMKM kekurangan modal untuk mempertahankan dan melanjutkan usaha mereka, selain karena keterbatasan modal, prospek usaha yang kurang bagus, dan terbatasnya akses bahan baku juga menjadi alasan para pelaku UMKM memilih untuk memberhentikan usaha mereka (Ismoyo, 2021).

Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan. Sementara itu, menurut laporan pengaduan ke Kemenkop UKM selama pandemi Covid-19 yang berlangsung pada bulan Oktober 2020, sebanyak 39,22% UMKM mengalami kendala keterbatasan modal (Kemenkeu, 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM untuk mengatasi kendala permodalan yang mereka alami dengan menerbitkan kebijakan melalui program restrukturisasi kredit.

Sejak diberlakukannya kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterbitkan oleh pemerintah banyak UMKM yang terbantu dari sisi keuangannya. Tercatat lebih dari 3,59 juta UMKM telah memanfaatkan program ini dengan nilai sebesar Rp285,17 triliun per tanggal 31 Juli 2021 (Kemenkeu, 2021). Dilansir dari [Indonesia.go.id](https://www.indonesia.go.id), penyaluran KUR dapat dilakukan melalui kantor cabang pembantu

bank pelaksana. Adapun salah satu persyaratan umum untuk menerima KUR yaitu UMKM mengajukan surat permohonan KUR kepada bank dengan melampiri dokumen seperti perizinan usaha, legalitas usaha, dan catatan keuangan yang memadai dan sistematis sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (Indonesia.go.id, 2019). Untuk membuat catatan keuangan tersebut maka UMKM perlu melakukan pencatatan rutin atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama proses usaha berlangsung, kemudian atas catatan tersebut dilakukan pembukuan. Hasil akhir dari semua proses tersebut akan tertuang dan tersaji di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itulah yang nantinya akan dijadikan UMKM sebagai dokumen atas catatan keuangan selama periode tertentu untuk mendapatkan pinjaman sebagai penambah modal usaha.

Selain menjadi salah satu persyaratan umum untuk mengajukan permohonan KUR, laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai dokumen keuangan untuk melakukan pinjaman di lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank lainnya. Akan tetapi, faktanya di lapangan masih banyak UMKM yang belum melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diberlakukan di Indonesia sehingga mereka terkadang kesulitan untuk mengajukan permohonan KUR atau pinjaman ke lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan hasil pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sebagian besar UMKM di Indonesia belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar, hanya sekitar 20% UMKM yang mampu menyusunnya. Sebagian besar UMKM hanya melakukan pencatatan transaksi keuangan secara sederhana terkait arus kas masuk dan arus kas keluar selama proses usaha berlangsung

(Mahrizal, 2017). Masih sangat jarang ditemui UMKM yang melakukan pencatatan untuk utang dan piutang usaha yang terjadi serta masih banyak UMKM yang belum melakukan pembukuan yang terstruktur dan memadai sesuai dengan pedoman akuntansi (Purwantiningsih, 2020).

Laporan keuangan masih sangat asing bagi para pelaku UMKM. Kurangnya pengetahuan terkait penyusunan laporan keuangan menjadi faktor utama banyak UMKM tidak memiliki laporan keuangan. Selain itu, UMKM juga kurang menyadari pentingnya laporan keuangan dalam perkembangan dan kemajuan usaha mereka (Mahrizal, 2017). Dengan memahami arti pentingnya laporan keuangan bagi keberlangsungan UMKM maka akan membantu UMKM yang ada di Indonesia agar lebih mudah untuk melakukan perencanaan usahanya, mengontrol biaya operasional dan non operasionalnya, melihat prospek ke depan terkait kinerja UMKM di periode berikutnya. Laporan keuangan juga penting untuk menentukan berapa besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan UMKM ke pemerintah sebagai bentuk kontribusi aktif dalam menunjang perekonomian negara Indonesia. Sebagian besar dari UMKM kurang memahami pentingnya laporan keuangan tersebut sehingga hanya berfokus pada kegiatan pemasaran dan pengembangan produk saja (Purwantiningsih, 2020). Persepsi rumitnya menyusun laporan keuangan sering menjadi alasan pelaku UMKM untuk tidak melakukannya.

Untuk memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan, pada tahun 2016 terbitlah standar yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa SAK EMKM

merupakan standar akuntansi yang lebih sederhana dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM (IAI, 2016).

CV Machmuda Jaya adalah UMKM yang bergerak di bidang jasa yang kegiatan usahanya berfokus pada pendidikan, pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja berkompeten ke seluruh Indonesia. CV Machmuda Jaya telah berdiri sejak tahun 2012 di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik CV Machmuda Jaya, pencatatan transaksi keuangan terkait pengeluaran dan pemasukan arus kas dilakukan dengan menambahkan total pemasukan dan mengurangi dengan pengeluarannya untuk memperoleh laba bulanan. Proses pencatatan transaksi keuangan hanya dilakukan seadanya tanpa melakukan penjurnalan, sehingga sampai saat ini CV Machmuda Jaya belum menyusun laporan keuangan karena belum ada tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang pembukuan. Selain itu, seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki CV Machmuda Jaya belum pernah dibukukan dan tidak ada pemisahan harta dengan pemilik CV.

Melihat pentingnya penyusunan laporan keuangan bagi pelaku UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), penulis tertarik untuk menjadikan topik pembahasan tersebut dalam karya tulis yang berjudul “PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA CV MACHMUDA JAYA BERDASARKAN SAK EMKM”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang dibahas dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh CV Machmuda Jaya selama ini?
- 2) Bagaimana laporan keuangan CV Machmuda Jaya jika disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pencatatan transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh CV Machmuda Jaya.
- 2) Untuk menghasilkan laporan keuangan CV Machmuda Jaya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis telah melakukan survei pada beberapa UMKM di Kabupaten Tanah Laut, dan UMKM yang bersedia untuk dimintai data adalah CV Machmuda Jaya. Atas dasar tersebut pembahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada penyusunan laporan keuangan CV Machmuda Jaya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) selama periode 2021. Data yang diolah penulis hanya berfokus pada

lingkup aktivitas yang dilakukan CV Machmuda Jaya dalam menjalankan usahanya selama tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait penyusunan laporan keuangan UMKM dan sebagai bentuk kontribusi positif dengan harapan dapat membuat perubahan yang lebih baik dalam bidang pendidikan dan perekonomian.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan dan mengembangkan pengetahuan yang telah dipelajari oleh penulis terkait penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM dan juga untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam memecahkan sebuah masalah terkait penyusunan laporan keuangan UMKM dengan bijak dan terstruktur.
- b) Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membantu penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM serta dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan dalam kegiatan usaha yang akan memudahkan pelaku UMKM untuk mengelola keuangan mereka secara terstruktur melalui laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan CV Machmuda Jaya. Teori yang diuraikan mencakup tentang penjelasan mengenai UMKM, SAK EMKM, dan pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari objek yang telah dipilih oleh penulis yaitu CV Machmuda Jaya, seperti sejarah singkat, struktur organisasi, visi dan misi, proses bisnis, dan data keuangan serta membahas tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dan mengolah data tersebut. Metode yang digunakan antara lain, metode studi kepustakaan, metode wawancara, dan metode observasi lapangan. Dari ketiga metode tersebut, nantinya akan diperoleh data yang akan dijadikan penulis sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan CV Machmuda Jaya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan diharapkan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan khususnya untuk CV Machmuda Jaya selaku objek penelitian.